



## KOMUNIKASI BUDAYA DALAM ASPIRASI PETANI SUBAK TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DAN BAGI HASIL PENGELOLAAN DTW JATILUWIH

Maulana Sandijaya <sup>a,1</sup>

<sup>a</sup> Univesitas Udayana

<sup>1</sup> Corresponding Author, email: sandijaya157@gmail.com (Sandijaya)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 15-09-2024

Revised: 26-09-2024

Accepted: 23-10-2024

Published: 31-10-2024

#### Keywords:

Farmers, Subak  
 Jatiluwih, World  
 Cultural Heritage,  
 Profit Sharing, Land  
 conversion

### ABSTRACT

*This research examines the aspirations of farmers in Subak Jatiluwih regarding land conversion and profit sharing for the management of the Jatiluwih tourist attraction (DTW), in Jatiluwih Village, Penebel District, Tabanan Regency, Bali. This research is important to carry out, because based on brief observations and in-depth interviews with Subak or Pekaseh clients, it was found that there was a gap between ideal conditions (das sollen) and reality (das sein). Farmers as cultivators and owners of rice fields feel that they have received unfair treatment, especially in terms of pahpahan or the profit sharing system which originates from the Jatiluwih DTW ticket levy. Profit sharing itself involves the Tabanan Regency Government (Pemkab), Jatiluwih DTW Management, traditional villages, and farmers. The farmers in Subak Jatiluwih, as owners and cultivators of 227 hectares of rice fields, feel they are only being used as a tourist attraction. Farmers are also worried about land conversion. There are at least two restaurants standing in Subak Jatiluwih. The existence of these two restaurants was also the main focus of the UNESCO delegation at the WWF Summit in May 2024. Farmers are worried that if land conversion continues, the area of Subak will narrow and the WBD status could be revoked by UNESCO. The research question is, how is the profit sharing system determined, so that farmers feel unfair? Second question, how does the land conversion occur? To answer this question, researchers used qualitative research methods by interviewing farmers as primary data and conducting literature studies from reports in the mass media as secondary data. The primary and secondary data were then analyzed using interpretive descriptive techniques. Meanwhile, the theory used by researchers is a postmodern approach, with Michael Foucault's theory of power-knowledge relations.*

### PENDAHULUAN

Subak Jatiluwih di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, merupakan bagian Kawasan Catur Angga Batukaru sebagai salah satu dari empat kawasan yang mendukung satu kesatuan Bali Cultural Landscape Subak System. Empat kawasan tersebut adalah Pura Ulundanu Batur (Kabupaten Bangli), DAS Pakerisan (Kabupaten Gianyar), Pura Taman Ayun (Kabupaten Badung), dan kawasan Catur Angga Batukaru (Kabupaten Tabanan).

Empat kawasan tersebut ditetapkan sebagai world heritage atau Warisan Budaya Dunia (WBD) tak benda oleh UNESCO pada 29 Juni 2012 di Kota St. Petersburg, Rusia. Sejak ditetapkan sebagai warisan budaya dunia (WBD) tak benda oleh UNESCO pada 2012 silam, kunjungan wisatawan ke Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih termasuk Subak Jatiluwih di dalamnya, meningkat signifikan. Hal itu berpenaruh pada peningkatan pendapatan warga setempat. Perkembangan ekonomi setelah penetapan Subak Jatiluwih sebagai WBD yakni meningkatnya jumlah tenaga kerja langsung menjadi 63 orang pada usaha pariwisata di Desa Jatiluwih, pendapatan dari usaha-usaha pariwisata meningkat sebesar 20% sampai 40%, dan Desa Adat Jatiluwih mendapatkan distribusi pendapatan sebesar 30% (Galuh, 2022).

Pemerintah Kabupaten Tabanan membentuk Badan Pengelola Daya Tarik Wisata berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 84 Tahun 2013. Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengembangan, dan pengawasan agar Subak Jatiluwih sebagai daya tarik wisata kelestariannya dapat terjaga, kunjungan wisatawan diharapkan terus meningkat, dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat lokal baik dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Untuk melaksanakan operasionalisasi dalam pengelolaan, Badan Pengelola ini kemudian membentuk Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Jatiluwih (Widari, 2024).

Namun, menggeliatnya pariwisata justru menjadi ancaman bagi masa depan Subak Jatiluwih. Degradasi lahan berupa alih fungsi lahan berlangsung cepat. Lahan sawah banyak dibangun akomodasi pariwisata, seperti vila, kafe, hingga resto di tengah-tengah subak. Ironisnya, sebagian dari bangunan itu sebagian tidak mengantongi izin atau ilegal. Terdapat 10 unit homestay dan restoran dengan ukuran penggunaan lahan sedang hingga luas di jalan utama Desa Jatiluwih. Jumlah ini akan terus meningkat tergantung promosi dan intervensi pariwisata yang berkelanjutan sehingga mengakibatkan konversi lahan terus berlanjut (Vitiara dkk, 2024).

Alih fungsi lahan itu juga diakui Pekaseh Subak Jatiluwih I Wayan Mustira. Menurut Mustira, luas lahan sawah di Subak Jatiluwih adalah 303 hektare. Namun, yang bisa digunakan untuk bercocok tanam hanya 75 persen (227,41 hektare). Sementara 75,6 hektare sisanya sudah tidak produktif lagi karena alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di Jatiluwih mendapat sorotan dari Wakil Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO, Prof. Ismunandar. Ia menyoroti menjamurnya keberadaan kafe dan restoran di kawasan Subak Jatiluwih. UNESCO disebut akan melakukan penilaian ulang terkait status warisan budaya pada Subak Jatiluwih (Bali.idntimes.com edisi 24 Mei 2024).

Para petani yang tergabung dalam Subak Jatiluwih juga merasa mendapat ketidakadilan dalam hal paphahan atau sistem bagi hasil antara Pemkab Tabanan, DTW Jatiluwih, dan para petani. Sebagai pelaku utama di subak, petani merasa hanya dijadikan objek pariwisata tanpa diimbangi bagi hasil yang adil.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, baik data tertulis maupun lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian dilakukan di Subak Jatiluwih yang terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Penelitian ini dilakukan melalui observasi di media massa edisi Mei sampai Juli 2024, dilanjutkan dengan wawancara langsung dengan narasumber pada pertengahan September 2024.

Jenis data penelitian ini menitik beratkan pada keterangan masyarakat setempat dalam hal ini ketua petani atau kelian subak sebagai sumber data primer. Selain itu sumber data

didapatkan dari media massa sebagai data sekunder sesuai dengan pendapat Sugiyono (2012: 308). Adapun teknik pengumpulan data diawali dengan observasi ke Subak Jatiluwih dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan kelian subak, dan dokumentasi berupa foto-foto tentang sawah dan bangunan restoran yang berada membangun di atas lahan Subak Jatiluwih. Kehadiran peneliti memberikan perhatian utama aspirasi petani tentang bagi hasil dan alih fungsi lahan Subak Jatiluwih yang berpotensi pada dicabutnya WBD oleh UNESCO.

Penggunaan metode kualitatif relevan dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, metodologi penelitian kualitatif dapat dipandang sebagai suatu brikolase, dan peneliti sebagai bricoleur. Dalam bahasa Prancis bricoleur adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya dan menggunakan alat yang tidak semestinya jika dilihat dari alat yang digunakan oleh tukang. Bricoleur memunculkan brikolase, yaitu, serangkaian praktik yang disatu padukan dan disusun secara rapi sehingga menghasilkan solusi bagi persoalan dalam situasi yang nyata. Pertimbangan kedua adalah penelitian kualitatif memanfaatkan sarana kepakaran metodologisnya sendiri, dengan menggunakan strategi, metode, atau data – data empiris apapun yang ada. Pertimbangan ketiga, metode kualitatif lebih relevan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Pertimbangan terakhir, metode kualitatif merupakan metode yang peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2001).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Petani di Subak Jatiluwih**

Subak Jatiluwih memiliki luasan 227,1 hektare dan digarap 547 petani. Masing-masing petani menggarap lahan sawah dengan luasan berbeda. Subak Jatiluwih terdiri dari tujuh tempekan. Subak didefinisikan sebagai organisasi petani tradisional di Bali yang menerapkan sistem irigasi berlandaskan filosofi masyarakat Bali yakni Tri Hita Karana. Tri Hita Karana adalah manifestasi hubungan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan alam (palemahan), serta manusia dengan sesama manusia (pawongan).

Menurut Windia et al., (2015), kekuatan subak terletak pada ketergantungan bersama terhadap air irigasi dan juga disatukan oleh adanya pura subak. Oleh karena itu, para anggota Subak Jatiluwih terus mengusahakan pemeliharaan pura subak secara gotong royong dan adanya distribusi dana pariwisata dari Badan Pengelola DTW Jatiluwih turut membantu anggota subak dalam memperbaharui bangunan fisik pada pura subak.

Kegiatan ritual yang dilakukan oleh anggota subak, baik sebelum dan setelah adanya predikat WBD, kegiatan upacara ritual keagamaan yang dilakukan oleh anggota subak baik secara individu maupun kelompok masih terus dilaksanakan. Hasil penelitian Dewi et al., (2018), yang menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan pariwisata yang begitu pesat tidak mempengaruhi ritual keagamaan yang dilaksanakan oleh anggota subak, salah satunya perubahan jumlah iuran keagamaan menjadi lebih ringan.

Namun demikian, pariwisata juga memberi dampak negatif yaitu menimbulkan polusi (udara, air, suara, limbah), hilangnya bentang alam dan tanah pertanian, hilangnya ruang terbuka, perusakan terhadap flora dan fauna, degradasi terhadap lanskap, situs sejarah dan monumen, penurunan volume air, dan terganggunya kehidupan satwa liar (Kreag, 2001).

Pekaseh Subak Jatiluwih I Wayan Mustra saat diwawancarai langsung di rumahnya mengungkapkan keresahan para petani yang tergabung dalam Subak Jatiluwih. Mustra dipilih menjadi pekaseh pada 2017. Ratusan petani merasa paphapan atau bagi hasil yang diperoleh dari

pungutan tiket DTW Jatiluwih tidak adil. Para petani Subak Jatiluwih sebagai pemilik 227 hektare sawah merasa hanya menjadi objek pariwisata. Menurut Mustra, bagi hasil dibuat berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) yang diinisiasi Pemkab Tabanan. PKS melibatkan lima pihak, antara Pemkab Tabanan, Subak Jatiluwih, Desa Adat Jatiluwih, dan Gunung Sari. PKS berlaku selama lima tahun. PKS berakhir pada Desember 2023, pemerintah menunda karena ada kajian dari Universitas Udayana (Unud).

"Sebenarnya ini ada ketidakadilan di dalam pahpahan atau bagi hasil dari pendapatan. Pariwisata Jatiluwih itu objeknya subak, tanpa subak tidak ada. Kenapa kami sebagai objek? bukan subjek? Walaupun kami sudah disubsidi pupuk dan sebagian biaya upacara." (Mustra, 53 tahun, Klian Subak Jatiluwih, 18 September 2024)

### **Paruman Sebagai Sarana Komunikasi Petani**

Mustra menjelaskan, setiap tahun para petani yang tergabung dalam Subak jatiluwih selalu mengadakan paruman (rapat adat) besar. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, masyarakat Desa Adat memiliki kekuasaan dalam membentuk serta menetapkan peraturan berlandaskan hukum adat yaitu lainnya disebut dengan Awig-Awig serta Pararem yang pembentukannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau di Bali sering disebut dengan paruman (Winjaya dan Windia, 2023). Hal ini memungkinkan nilai-nilai demokrasi untuk diintegrasikan dengan kearifan lokal dan tradisi adat sehingga dapat mewujudkan sistem demokrasi dengan tetap berpijak pada keunggulan kebudayaan daerah (Suacana, 2015).

"Paruman untuk menyerap aspirasi dan melakukan penilaian kinerja sekaligus meminta masukan dari anggota subak." (Mustra, 53 tahun, Klian Subak Jatiluwih, 18 September 2024).

Hasil dari paruman, petani di Subak Jatiluwih berharap ada peningkatan bagi hasil dari pengelolaan DTW Jatiluwih. Meningkatnya kontribusi ini untuk membantu petani mengelola lahannya, karena setiap tahun biaya pengelolaan lahan terus meningkat. Dalam satu tahun siklus pertanian, ada dua kali masa tanam di Subak Jatiluwih. Selama satu tahun itu petani mengeluarkan anggaran sebesar Rp4 miliar, dengan hitungan kasar per hektare sawah menghabiskan biaya Rp2 juta. Anggaran itu untuk membiayai beragam keperluan, seperti biaya olahan, pupuk, termasuk biaya upacara. Kebutuhan Rp4 miliar itu belum termasuk dana pribadi yang dikeluarkan petani. Pengeluaran pribadi masih banyak karena setidaknya ada 15 upacara dalam satu musim tanam, termasuk membersihkan gulma dan membasmi hama.

Petani di Subak Jatiluwih diberi bagian 22% dari pendapatan brutto setiap bulan, sedangkan perhitungan netto petani diperkirakan mendapat 6,69%. Pada 2023 petani di Subak Jatiluwih hanya mendapat bagian Rp1 miliar. Jumlah itu tentu tidak mencukupi kebutuhan para petani selama setahun yang sedikitnya menghabiskan dana Rp4 miliar.

"Biaya yang kami butuhkan dalam satu tahun masa tanam setidaknya Rp4 miliar. Tahun 2023 kami hanya dapat Rp1 miliar, sisanya Rp 3 miliar itu kami petani swadaya. Iuarannya tergantung luasan sawah. Di sinilah petani merasa tidak diperhatikan, adahal pariwisata Jatiluwih tercipta berkat para petani yang turun temurun melestarikan subak" (Mustra, 53 tahun, Klian Subak Jatiluwih, 18 September 2024).

Selain tidak menutupi biaya selama setahun masa tanam, petani juga harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan tidak terduga. Mustra mencontohkan ketika terjadi longsor di Tempek



Besi Kalung dan Gunung Sari, petani harus memecah batu yang menghalangi saluran irigasi agar air lancar. Kalau tidak ada air maka petani tidak bisa menanam. Untuk memecah batu itu, petani hanya diberi anggaran Rp 2 juta, padahal menghabiskan Rp7,5 juta. Menurut Mustra, selain kejadian tak terduga, para petani juga harus mengeluarkan biaya perawatan pura piasan di Ulun Ciwi. Petani hanya diberi Rp1 juta, sementara biaya yang dikeluarkan lebih besar.

Terkait aspirasi para petani, Mustra mengaku secara khusus bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan untuk lebih memperhatikan subak. Salah satu usulannya adalah subak mendapat pembiayaan walau tidak Rp4 miliar penuh. Mustra mengungkapkan, yang harus diperhatikan terutama biaya olah-olahan karena sewa traktor terus naik. Sewa traktor dari Rp400 ribu per hari sekarang Rp600 ribu per hari. Dalam sehari tidak sampai 20 are sawah yang ditaraktor.

"Kami terus terang kecewa, saat ini bisa dikatakan Subak Jatiluwih tidak baik-baik saja. Saya masih redam petani, tunggu sampai akhir tahun 2024, karena janji Kadis Pariwisata (Tabanan) akan ada perubahan PKS (Perjanjian Kerja Sama). Kami masih menunggu. Kalau tahun depan masih sama, silakan mau tidak bertani tidak apa-apa, mau pasang seng tidak apa-apa." (Mustra, 53 tahun, Klian Subak Jatiluwih, 18 September 2024)

### Bentuk dan Dampak Alih Fungsi Lahan

Petani juga khawatir dengan masifnya alih fungsi lahan. Mustra menyebut berdirinya sejumlah bangunan di tengah Subak Jatiluwih menjadi sorotan delegasi UNESCO saat KTT WWF pada Mei 2024. Bangunan yang disorot adalah bangunan di belakang monumen Jatiluwih. Bangunan lain yang menjadi sorotan adalah Restoran The Rustic Bali. Restoran ini tepat berada di tengah-tengah Subak Jatiluwih. Setiap utusan UNESCO datang, keberadaan The Rustic selalu disorot. Bangunan lainnya yang disorot adalah Restoran CataVaca.



Foto 1. Papan larangan membangun di Subak Jatiluwih (Dok Pribadi Peneliti).

Menurut informasi di lapangan, Restoran The Rustic Bali milik warga lokal Jatiluwih. Restoran itu diduga tidak memiliki izin karena membangun di atas lahan hijau. Menurut Mustra, di dalam awig-awig subak tidak boleh ada alih fungsi, tapi itu hanya di atas kertas atau tidak bisa memberikan sanksi sebagaimana hukum positif.

Selain posisinya berada di tengah subak, The Rustic juga tidak punya tempat parkir memadai, sehingga pengunjung menggunakan jalan subak untuk parkir. Hal lain bisa mengancam kelestarian subak adalah pembuangan limbah. Pengurus Subak Jatiluwih juga sudah memanggil pemilik The Rustic untuk klarifikasi karena bangunan itu sangat mengganggu. Luas bangunan The Rustic awalnya 4x6 meter menyerupai kubu atau gubuk di tengah sawah. Kini terus berkembang dan diperkirakan luasnya bertambah menjadi 10x10 meter.



Foto 2. Dua orang turis asing sedang berjalan dengan latar belakang sawah terasering Subak Jatiluwih pada pertengahan September 2024. Di tengah sawah tampak berdiri The Rustic Bali. (Foto Dokumen Pribadi Peneliti).



Foto 3. Suasana di dalam The Rustic Bali. (Foto Dokumen Pribadi Peneliti).

Sementara CataVaca yang dibangun belakangan lebih luas dari The Rustic. Diperkirakan CataVaca berdiri di atas lahan lebih dari 20 are. Pposisi CataVaca lebih ke timur dan lebih masuk ke dalam, tapi tetap berada di kawasan Subak Jatiluwih. Dari The Rustic dan CataVaca inilah pengunjung bisa menikmati pemandangan Subak Jatiluwih.





Foto 3. Restoran CataVaca tampak dari luar (Foto Dokumen Pribadi Peneliti).



Foto 4. Suasana di dalam CataVaca (Foto Dokumen Pribadi Peneliti)

Mustra dan para petani lainnya meminta pemerintah tegas terhadap alih fungsi lahan, karena luasan Subak Jatiluwih akan ditinjau setiap dua tahun oleh UNESCO melalui tim Kemendikbud.

"Dari hasil pemetaan Pupuk Indonesia tahun 2022, lahan sawah berkurang 7 hektare dari luasan semula 227 hektare. Itu baru empat tempek yang didata" (Mustra, 53 tahun, Klian Subak Jatiluwih, 18 September 2024).

Menurut Mustra, sejak Subak Jatiluwih ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, manfaat yang dirasakan petani sangat banyak. Petani terbantu pembiayaan, terutama biaya upacara seperti biaya aci (banten) yang dulu mengeluarkan uang, sekarang tidak lagi mengeluarkan anggaran, bahkan ada beberapa upacara yang tidak mengambil iuran dari petani karena sudah mendapat subsidi DTW Jatiluwih. Perekonomian warga juga berdampak, sejumlah warga menjadikan rumahnya sebagai homestay dan usaha lainnya.

"Dengan adanya perhatian biaya olah-olahan (pembajakan dan penanaman), maka bisa mengerem penjualan lahan untuk pembangunan. Petani siap memperkecil warungnya kalau ada support. Selama ini belum ada insentif untuk petani berupa olah-olahan maupun biaya panen" (Mustra, 53 tahun, Klian Subak Jatiluwih, 18 September 2024).

Para petani meminta Pemkab Tabanan tegas mengantisipasi alih fungsi lahan agar tidak semakin merajalela di masa mendatang. Para petani meyakini sawah di Jatiluwih adalah tempat suci sebagai tempatnya Dewi Sri atau Dewi Kesuburan yang identik dengan padi. Untuk mengalihkan fungsi sawah wajib ada upacara khusus. Jika itu dilanggar diyakini akan mendatangkan bencana.

"Karena kami pengurus subak tidak punya wewenang, sehingga kami tidak berani menekan (pelaku pelanggaran jalur hijau)" (Mustra, 53 tahun, Klian Subak Jatiluwih, 18 September 2024).

Petani khawatir jika alih fungsi lahan tidak segera disetop, maka pencabutan Subak Jatiluwih sebagai WBD bukan hal mustahil. Dampaknya tidak hanya pada Desa Jatiluwih, tapi citra pariwisata Bali dan Indonesia pada umumnya.

Kutipan dari Mustra menegaskan bahwa aspirasi petani Subak Jatiluwih terkait alih fungsi lahan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kental dengan dimensi budaya dan religius. Sawah di Jatiluwih dipandang sebagai tempat suci yang berhubungan langsung dengan Dewi Sri, simbol kesuburan padi, sehingga setiap perubahan fungsi lahan wajib melalui upacara adat khusus. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi budaya dalam konteks Subak tidak hanya terjadi antara petani dan pemerintah, tetapi juga melibatkan nilai-nilai spiritual yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Ketika Mustra menyebut ketidakberanian pengurus Subak untuk menekan pelanggaran jalur hijau, hal ini menekankan pentingnya saluran komunikasi formal dan legitimasi kelembagaan yang jelas agar aspirasi petani bisa terdengar dan dipatuhi.

Selain itu, wawancara juga mengungkapkan hubungan antara komunikasi budaya dan aspek ekonomi melalui pengelolaan DTW Jatiluwih. Subsidi untuk biaya upacara dan insentif bagi petani, seperti pengurangan biaya aci atau dukungan olah-olahan sawah, menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis budaya dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian budaya. Petani memahami bahwa keberlangsungan warisan budaya ini terkait erat dengan praktik komunikasi yang efektif antara pengelola wisata, pemerintah, dan masyarakat lokal. Dengan demikian, aspirasi petani bukan sekadar tuntutan ekonomi, tetapi juga bentuk komunikasi budaya yang menekankan perlunya perlindungan lahan, penghormatan terhadap tradisi, dan partisipasi aktif dalam pengelolaan bagi hasil DTW Jatiluwih

## SIMPULAN

Pembangunan fasilitas pariwisata yang tidak sesuai dengan tata ruang berdampak negatif terhadap lingkungan. Masifnya alih fungsi lahan di Subak Jatiluwih terjadi setelah ramainya wisatawan. Setidaknya ada dua restoran besar (The Rustic Bali dan CataVata) beridiri di wilayah Subak Jatiluwih. Keberadaan The Rustic, bahkan menjadi sorotan utama delegasi UNESCO saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) di Nusa Dua pada Mei 2024.

Hasil penelitian sementara juga menunjukkan para petani sebagai pemilik dan penggarap 227 hektare sawah merasa hanya menjadi objek pariwisata di Daya Tarik Wisata Jatiluwih. Kondisi ini membuat para petani kecewa, merasa mendapat ketidakadilan dalam pahapan atau



bagi hasil yang diperoleh dari pungutan tiket pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih.

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai suatu sumber di masa mendatang untuk mengkaji lebih lanjut tentang petani maupun Subak Jatiluwih. Selain itu, penelitian ini diharapkan membuka fakta di lapangan, bahwa ada hal urgent atau sangat penting yang harus dikerjakan secara bersama-sama oleh masyarakat Desa Jatiluwih, para petani, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk menjaga eksistensi Subak Jatiluwih dari ancaman alih fungsi lahan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa aspirasi petani Subak Jatiluwih terkait alih fungsi lahan dan bagi hasil pengelolaan DTW Jatiluwih tidak bisa dilepaskan dari dimensi komunikasi budaya. Petani tidak hanya menuntut keadilan ekonomi, tetapi juga perlindungan nilai-nilai adat dan tradisi yang melekat pada sawah sebagai simbol kesuburan dan identitas lokal. Alih fungsi lahan yang terjadi akibat pembangunan fasilitas pariwisata yang tidak sesuai dengan tata ruang tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga melemahkan posisi petani dalam struktur pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara petani, pemerintah, dan pengelola DTW menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara konservasi budaya, kelestarian lingkungan, dan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, penting bagi semua pihak untuk membangun mekanisme komunikasi budaya yang terstruktur dan partisipatif. Pemerintah daerah, pengelola DTW, dan masyarakat desa harus menciptakan forum dialog yang memungkinkan aspirasi petani didengar, baik terkait larangan alih fungsi lahan maupun pembagian hasil pengelolaan wisata. Saran praktis yang bisa diterapkan antara lain: pemberian insentif dan subsidi untuk biaya upacara adat, pelibatan petani dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan DTW, serta monitoring berkala terhadap dampak pembangunan terhadap sawah dan lingkungan. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga eksistensi Subak Jatiluwih, tetapi juga memperkuat komunikasi budaya sebagai fondasi keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat dan tradisi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan, dkk. 2015. Implementasi Tri Hita Karana Dalam Pengelolaan Warisan Budaya Dunia Sebagai Daya Tarik Wisata Di Bali. Denpasar: Universitas Udayana.
- Darma, Y. A. 2009. Analisis Wacana Kritis. Bandung: Yrama Widya.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. 2013. Cultural Landscape of Bali World Heritage Site.
- Foucalut, M. (1980). Kekuasaan/Pengetahuan, wawancara terpilih dan tulisan-tulisan lainnya 1972-1977. Londn: The Harvester Press
- Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardiman, F. Budi. 2009. Kritik Ideologi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. 2010. Cultural Landscape of Bali Province.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. Postmodernisme: Teori dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.
- Madiasworo Taufan, Tjahjono Gunawan, Tjahjati Budhy, Budhisantoso Subur. 2014. Sustainable Heritage Area Management Model Study on Enviromental Wisdom in Subak Jatiluwih area, Badung Regency, Bali.

- Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir, Noeng. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta.
- Adi, Ni Made Uning Praptika, dkk. 2022. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Petani Subak Jatiluwih Setelah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Dunia Subak Jatiluwih, Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH, Vol 9, Nomor 3.
- Widari, Dewa Ayu Diyah Sri Widari. 2021. Dampak Pengelolaan Warisan Budaya Subak Jatiluwih sebagai Daya Tarik Wisata Terhadap Lingkungan, Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata, Vol.2, No. 1.
- Tribun Bali. 2024. Delegasi WWF Soroti Bangunan di Sawah Jatiluwih Tabanan. Sumber: <https://bali.tribunnews.com/2024/05/25/delegasi-wwf-soroti-bangunan-dibangun-di-sawah-dtw-jatiluwih-tabanan>https. Diakses 22 September 2024.
- Radar Bali. 2024. Gegara Ada Bangunan di Tengah Subak Jatiluwih, Ini Tindakan yang Dilakukan Pemkab Tabanan. Sumber: <https://radarbali.jawapos.com/tabanan/704690951/gegara-ada-bangunan-tengah-subak-jatiluwih-ini-tindakan-yang-dilakukan-pemkab-tabanan> Diakses 22 September 2024,
- Tribun Bali. 2024. Delegasi WWF Soroti Bangunan di Sawah Jatiluwih Tabanan. Sumber: <https://bali.tribunnews.com/2024/05/25/delegasi-wwf-soroti-bangunan-dibangun-di-sawah-dtw-jatiluwih-tabanan>https. Diakses 22 September 2024